



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1-2, Lamongan, Jawa Timur 62251,
Telepon (0322) 321012, Faksimile (0322) 321012, Pos-el bagumum@lamongan.go.id.
Laman www.lamongankab.go.id

Nomor : 050/08/413.031/2026 Lamongan, 7 Januari 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko Tahun 2026 Bagian Umum Kabupaten Lamongan.** Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
di-
L A M O N G A N

Disampaikan dengan hormat Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2026 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

an. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Umum

JOHNY INDRIANTO FIRMANSYAH, S.STP.,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19830430 200112 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah

Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1-2, Lamongan, Jawa Timur 62251,
Telepon (0322) 321012, Faksimile (0322) 321012, Pos-el bagumum@lamongan.go.id.
Laman www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	050/35/413.031/2026
TANGGAL TERBIT	Januari 2026

Disiapkan Oleh	:	Staf Bagian Umum Retno Siswiyani, S.AP
Diperiksa	:	Kasubag TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian OLYVIA FRANSISCA, SE 19831023 201504 2 001
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Umum JOHNY INDRIANTO FIRMANSYAH, S.STP.,M.Si NIP. 19830430 200112 1 002

Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko
Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan koesioner yang dibuat dan disebar ke pejabat dan staf Bagian Umum, bahwa persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Umum berjalan dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Jadi untuk pengendalian sangat kondusif sekali.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Karena dirasa kondisi pengendalian risiko sangat kondusif sekali, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian, Kerjasama berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik semakin mempermudah Bagian Umum dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian Umum memiliki konteks strategis sebagai OPD yang berkonsentrasi terhadap penetapan kebijakan dalam bidang pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pimpinan dan pelayanan dalam hal informasi dan kegiatan pimpinan. Penetapan ini

berdasarkan tuis yang diemban Bagian Umum yang bergerak didalam urusan Ke Sekertariatan Daerah.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko Bagian Umum antara lain

Tabel B.1 Indentifikasi Risiko Bagian Umum (Terlampir)

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko Bagian Umum antara lain :

Tabel C.1 Analisis Risiko Bagian Umum (Terlampir)

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan Bagian Umum, antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala;
- b. Melaksanakan pembinaan SDM demi peningkatan kualitas SDM Bagian Umum;
- c. Bekerjasama dengan Inspektorat terkait SPIP internal.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DI BUTUHKAN

Pentingnya dan masih sedikitnya sosialisasi terkait Mitigasi Risiko bisa mengakibatkan celah yang nantinya bisa membuat pengendalian risiko yang sudah baik menjadi kurang maksimal, dibutuhkan effort yang lebih keras lagi dari Inspektorat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi demi menyempurnakan pengendalian risiko di kabupaten Lamongan.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Bagian Umum, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Umum Sekretariat Daerah:							
1	Menambah personil dalam pelayanan kerumahtanggaan pimpinan	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Pegawai ASN Lingkup Bagian Umum Setda	Desember	Belum terealisasi	0% resiko
2	Melakukan Koordinasi Dengan Bagian Organisasi Srtda dan BKPSDM	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Pegawai ASN Lingkup Bagian Umum Setda	Oktober	Belum terealisasi	0% resiko
3	Pendampingan dan Pelatihan Mandiri Terkait Pengoperasian Aplikasi Berbasis Digital	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Pegawai ASN Lingkup Bagian Umum Setda	April dan Oktober	Belum terealisasi	0% resiko
4	Menganggarkan Kebutuhan dalam perencanaan berikutnya (PAK)	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Pegawai ASN Lingkup Bagian Umum Setda	Juli	Belum terealisasi	0% resiko
Risiko Operasional OPD Bagian Umum Sekretariat Daerah:							
1	Optimalisasi pendampingan yang intens dan koordinasi dengan BPKAD	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Petugas Barang Setda	Juni	Belum terealisasi	0% resiko
2	Melakukan pendampingan yang intens dengan petugas barang masing-masing bagian	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Petugas Barang Setda	Juni	Belum terealisasi	0% resiko
3	Melaksanakan bimbingan teknis bagi ASN Lingkup Bagian Umum terkait dengan pengembangan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan	Sosialisasi	Bagian Umum	Pegawai ASN Lingkup Bagian Umum Setda	Oktober	Belum terealisasi	0% resiko
4	Melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait usulan kegiatan bimtek dengan kurikulum diklat yang sesuai	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Pegawai ASN Lingkup Bagian Umum Setda	Oktober	Belum terealisasi	0% resiko
5	Melakukan Pendampingan Terkait Pengoperasian Sistem Informasi Berbasis Digital	sosialisasi dan rapat koordinasi	Bagian Umum	Petugas Persediaan Barang	November	Belum terealisasi	0% resiko
6	Komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pengguna dan pihak rekaan terkait kejelasan spesifikasi barang pakai habis yang diminta	Rapat Koordinasi Internal	Bagian Umum	Pegawai Lingkup Bagian Umum	November	Belum terealisasi	0% resiko

7	Melakukan kerjasama dengan rekanan lain yang dapat menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Rekanan	November	Belum terealisasi	0% resiko
8	Memastikan bahwa barang yang diterima telah sesuai dengan BAST. Melibatkan pihak yang berkompeten dalam menentukan dan memeriksa spesifikasi barang.	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	Bagian Umum	Bagian-Bagian Setda dan Rekanan	November	Belum terealisasi	0% resiko
9	Monitoring secara berkala terkait data pegawai	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Pegawai lingkup Bagian Umum Setda	Juli	Belum terealisasi	0% resiko
10	Peningkatan implementasi SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara optimal	SOP, Sosialisasi	Bagian Umum	Pejabat dan Pegawai Lingkup Setda	Desember	Belum terealisasi	0% resiko
11	Menjalin kerjasama dengan rekanan untuk kegiatan perbaikan BMD/Kendaraan dinas	SOP, Sosialisasi	Bagian Umum	Pejabat dan Pegawai Lingkup Setda	November	Belum terealisasi	0% resiko
12	Menginventarisir Semua Kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Dibutuhkan Ke Dalam Proses Perencanaan Anggaran Tahun Berikutnya	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Pimpinan	November	Belum terealisasi	0% resiko
13	Menginventarisir Semua Kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Dibutuhkan Ke Dalam Proses Perencanaan Anggaran Tahun Berikutnya	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Bagian-Bagian Setda	Desember	Belum terealisasi	0% resiko
14	Rapat Evaluasi Terkait Hasil Kegiatan Yang Dilaksanakan	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Bagian-Bagian Setda	April, Juli, September dan Desember	Belum terealisasi	0% resiko
15	Rapat Evaluasi Terkait Hasil Kegiatan Yang Dilaksanakan	Rapat Koordinasi	Bagian Umum	Bagian-Bagian Setda	April, Juli, September dan Desember	Belum terealisasi	0% resiko

V. RENCANA PEMANTAUAN

Berikut ini merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko Bagian Umum, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Umum Sekretariat Daerah:						
1	Menambah personil dalam pelayanan kerumahtanggaan pimpinan	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	Desember	Desember	0% resiko

2	Melakukan Koordinasi Dengan Bagian Organisasi Srtda dan BKPSDM	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	November dan Desember	November dan Desember	0% resiko
3	Pendampingan dan Pelatihan Mandiri Terkait Pengoperasian Aplikasi Berbasis Digital	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	Mei, Agustus, November dan Desember	Mei, Agustus, November dan Desember	0% resiko
4	Menggangguarkan Kebutuhan dalam perencanaan berikutnya (PAK)	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	Juli dan Desember	Juli dan Desember	0% resiko

Risiko Operasional OPD Bagian Umum Sekretariat Daerah:

1	Optimalisasi pendampingan yang intens dan koordinasi dengan BPKAD	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
2	Melakukan pendampingan yang intens dengan petugas barang masing-masing bagian	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
3	Melaksanakan bimbingan teknis bagi ASN Lingkup Bagian Umum terkait dengan pengembangan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
4	Melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait usulan kegiatan bimtek dengan kurikulum diklat yang sesuai	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
5	Melakukan Pendampingan Terkait Pengoperasian Sistem Informasi Berbasis Digital	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
6	Komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pengguna dan pihak rekaan terkait kejelasan spesifikasi barang pakai habis yang diminta	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
7	Melakukan kerjasama dengan rekanan lain yang dapat menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
8	Memastikan bahwa barang yang diterima telah sesuai dengan BAST. Melibatkan pihak yang berkompeten dalam menentukan dan memeriksa spesifikasi barang.	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
9	Monitoring secara berkala terkait data pegawai	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko

10	Peningkatan implementasi SOPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara optimal	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
11	Menjalin kerjasama dengan rekanan untuk kegiatan perbaikan BMD/Kendaraan dinas	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
12	Menginventarisir Semua Kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Dibutuhkan Ke Dalam Proses Perencanaan Anggaran Tahun Berikutnya	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
13	Menginventarisir Semua Kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Dibutuhkan Ke Dalam Proses Perencanaan Anggaran Tahun Berikutnya	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
14	Rapat Evaluasi Terkait Hasil Kegiatan Yang Dilaksanakan	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	0% resiko
15	Rapat Evaluasi Terkait Hasil Kegiatan Yang Dilaksanakan	Rapat Evaluasi Kegiatan	Kabag Umum	April, Juli, Oktober dan Desember	April, Juli, Oktober dan Desember	

VI. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada tahun 2026, dapat simpulan bahwa potensi-potensi risiko yang terjadi di Bagian Umum dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian risiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya risiko. Sehingga diharapkan pengendalian risiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi risiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian risiko, terjadi kolaborasi dan

koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian resiko.

